P-ISSN: 2355-5262 DOI: https://10.63824/mahatvavirya E-ISSN: 2963-8607

ANALISIS TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) PADA IMPLEMENTASI E-KATALOG DALAM MENDUKUNG PROGRAM ZERO CORRUPTION DI AKADEMI MILITER

Nadya Sekar Pramudita

Staf Pengadaan Akademi Militer Magelang ndyskrp20@gmail.com

Agung Prapsetvo

Prodi Teknik Sipil Pertahanan Akademi Militer Magelang kinggoenk@gmail.com

Kiki Lestari

Prodi Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan kikilesatari569@yahoo.com

Abstract

Corruption in the procurement of goods and services is a serious problem that occurs not only in the civilian sector but also in the military environment. One concrete effort to suppress corrupt practices is to utilise a digital system in the procurement of goods and services through the e-Catalogue. This study aims to analyse the implementation of the e-Catalogue in supporting the zero corruption program at the Military Academy using the Technology Acceptance Model (TAM) approach, which emphasises two main variables: perceived usefulness and perceived ease of use. The study employed a descriptive qualitative method, utilising interviews and observations of personnel involved in the procurement process. The results show that the use of the e-Catalogue can increase efficiency, transparency, and accountability, thereby supporting the strengthening of organisational integrity. However, successful implementation still faces challenges such as limited digital infrastructure and technological literacy among users. Overall, the e-Catalogue is considered effective as a modern procurement tool that supports clean and accountable governance in the military environment.

Keywords: e-Katalog, zero corruption, Technology Acceptance Model (TAM)

Abstrak

Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa merupakan permasalahan serius yang tidak hanya terjadi di sektor sipil, tetapi juga di lingkungan militer. Salah satu upaya konkret untuk menekan praktik korupsi adalah dengan memanfaatkan sistem digital



DOI: https://10.63824/mahatvavirya

dalam pengadaan barang dan jasa melalui e-Katalog. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi e-Katalog dalam mendukung program zero corruption di Akademi Militer dengan pendekatan Technology Acceptance Model (TAM), yang menekankan pada dua variabel utama: perceived usefulness dan perceived ease of use. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara dan observasi terhadap personil yang terlibat dalam proses pengadaan. penelitian menuniukkan bahwa pemanfaatan e-Katalog meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga mendukung penguatan integritas organisasi. Meskipun demikian, keberhasilan implementasi masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur digital dan literasi teknologi di kalangan pengguna. Secara keseluruhan, e-Katalog dinilai efektif sebagai alat pengadaan modern yang mendukung tata kelola bersih dan akuntabel di lingkungan militer.

Kata kunci: e-Katalog, zero corruption, Technology Acceptance Model (TAM)

PENDAHULUAN

Korupsi menjadi fenomena sosial yang berdampak pada kerugian negara yang merambah pada berbagai sektor, baik pemerintahan maupun non-pemerintahan. Korupsi tidak hanya terjadi di kalangan warga sipil, tetapi juga di lingkungan militer, yang sangat menerapkan disiplin dan mereka dididik secara tegas. Korupsi di kalangan angkatan bersenjata juga mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat. Salah satu contoh korupsi di lingkungan militer adalah pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), yang telah menimbulkan kerugian negara yang signifikan. Sebagai contoh, kasus korupsi pengadaan yaitu kasus pada pengadaan helikopter Agusta Westland (AW-101) yang melibatkan pejabat tinggi TNI (Hasan et al., 2024:4).

Pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu bidang yang paling rentan terhadap korupsi, yang dapat mengakibatkan kerugian negara yang signifikan. Sejak tahun 2004 hingga 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani sedikitnya 277 kasus korupsi di sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), yang mencakup sekitar 21 persen dari total kasus korupsi (Ernowo, 2023). Angka ini mencerminkan bahwa persoalan yang terjadi pada pengadaan barang dan jasa masih menjadi tantangan yang memerlukan penanganan serius oleh pemerintah. Kemajuan teknologi di era digital menjadikan pemanfaatan informasi teknologi sebagai kebutuhan utama untuk menciptakan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas di berbagai sektor, termasuk militer. Salah satu upaya untuk mendukung program zero corruption adalah digitalisasi proses pengadaan, khususnya melalui penerapan sistem e-katalog.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan dengan bantuan teknologi melalui aplikasi e-katalog merupakan sebuah transformasi yang diawali dengan berbagai tantangan. Kemajuan teknologi telah mendorong kemajuan di berbagai sektor. Pengadaan barang dan jasa



P-ISSN: 2355-5262

E-ISSN: 2963-8607

Vol. 12. No. 2. Sep 2025 P-ISSN: 2355-5262 E-ISSN: 2963-8607 DOI: https://10.63824/mahatvavirya

yang sebelumnya rentan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), kini dapat dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-katalog (Ariza, 2024:24). Kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah dipantau langsung oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Hal ini menjamin transparansi, efisiensi, dan daya saing.

E-Katalog merupakan platform digital yang menyajikan informasi mengenai daftar barang/jasa, lengkap dengan jenis, spesifikasi teknis, dan harganya, dari para penyedia yang telah mendapatkan persetujuan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sistem ini memungkinkan proses pengadaan dilakukan secara lebih terbuka, cepat, dan terhindar dari praktik korupsi (Sihaloho et al., 2024). Seperti halnya proses pengadaan barang dan jasa di Akademi Militer sudah menggunakan e-katalog. E-katalog memiliki keunggulan yang dapat mendukung pada upaya zero corruption seperti proses pengadaan barang dan jasa yang transparansi dan mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Akademi Militer, sebagai lembaga pendidikan militer di bawah naungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, memiliki tanggung jawab besar untuk membangun karakter dan menanamkan nilai-nilai integritas kepada para taruna dan seluruh civitas akademika. Untuk mencapai tujuan tersebut, penerapan e-katalog di lingkungan Akademi Militer tidak hanya dipandang sebagai bagian dari kebijakan yang bertujuan untuk mendorong efisiensi birokrasi, tetapi juga sebagai langkah strategis dan konkret dalam mendukung program zero corruption. Melalui sistem yang transparan dan akuntabel ini, Akademi Militer berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik korupsi, sekaligus memperkuat budaya integritas di setiap jenjang tugas dan tanggung jawab lembaga.

Digitalisasi e-katalog sebagai alat dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak lepas dari konsep Technology Acceptance Model (TAM), karena keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada sejauh mana pengguna menerima dan menggunakan teknologi tersebut. Dalam konteks ini, persepsi terhadap kemanfaatan (perceived usefulness) seperti peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas serta persepsi terhadap kemudahan penggunaan (perceived ease of use) seperti penghubung yang intuitif dan sistem yang responsif menjadi faktor kunci dalam mendorong penggunaan e-katalog. Apabila pengguna merasa bahwa e-katalog memudahkan pekerjaan mereka dan memberikan nilai tambah yang signifikan, maka tingkat penerimaan dan pemanfaatannya pun akan meningkat (Iqbal, 2020).

TAM adalah model yang dapat digunakan untuk menjelaskan penerimaan pengguna terhadap penggunaan sistem teknologi informasi. TAM dikembangkan oleh Davis dalam disertasi doktoralnya yang berjudul A Technology Acceptance Model for Empirically Testing New End-User Information Systems". (Wicaksono, 2022:1). Pada awalnya, perancangan TAM digunakan untuk menjelaskan bagaimana pengguna menerima teknologi informasi baru, seperti sistem informasi manajemen atau perangkat lunak. Seiring waktu, TAM juga telah digunakan dalam berbagai konteks teknologi, termasuk teknologi mobile, media sosial, dan IoT. Pada tahun 2000, Venkatesh dan Davis mengembangkan TAM 2, dengan menambahkan variabel baru, yaitu perceived usefulness dan perceived ease of use, serta menggabungkan sikap dan



P-ISSN: 2355-5262 DOI: https://10.63824/mahatvavirya E-ISSN: 2963-8607

norma subjektif menjadi satu variabel, yaitu pengaruh sosial atau social influence (Wicaksono, 2022:2).

Pada penelitian ini, mencoba menganalisis mekanisme pelaksanaan pengadaan berbasis web menggunakan aplikasi e-katalog 6 dan dengan menggunakan pisau analisis TAM Persepsi kemudahan (perceived ease of use) dan persepsi kegunaan (perceived usefulness) dalam mendukung program zero corruptions di Akmil. Implementasi pengadaan menggunakan e-Katalog sangat dipengaruhi oleh penerimaan pengguna (user acceptance). Pada kerangka ini, pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku pengguna terhadap penggunaan sistem e-Katalog. Model TAM dalam studi ini berfokus pada dua variabel utama, vaitu perceived usefulness (PU) dan perceived ease of use (PEOU), yang memengaruhi niat serta perilaku individu dalam mengadopsi sistem teknologi baru, sehingga dapat berkontribusi pada pencegahan tindak korupsi.

METODE

Penelitian ini dilakukan di lingkungan akademi militer dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis implementasi e-Katalog melalui perspektif Technology Acceptance Model (TAM) dalam mendukung program Zero Corruptions di Akademi Militer. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yang mendeskripsikan situasi atau fenomena dan menggambarkan suatu permasalahan. Penelitian deskriptif kualitatif dijelaskan dengan kata-kata sesuai dengan data yang didapatkan dari responden yang sesuai dengan pertanyaan peneliti yang kemudian dianalisis. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai persepsi dan pengalaman pengguna terhadap pengadaan barang dengan menggunakan sistem e-Katalog dalam konteks institusi militer kepada pejabat pengadaan, staf yang menangani pengadaan barang di satuan jajaran Akmil. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan observasi. Informan dipilih secara purposive sampling, terdiri atas personel yang terlibat langsung dalam proses pengadaan barang/jasa melalui e-Katalog, seperti pejabat pengadaan, staf pengadaan, dan pengguna akhir. selain itu, teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipatif. Analisis data menggunakan metode Technology Acceptance Model (TAM), untuk mengetahui efektifitas penggunaan aplikasi e-katalog untuk mekanisme pengadaan barang bagi satuan di Jajaran Akmil sehingga akan terbebas dari tindak pidana korups (zero corruptions).



P-ISSN: 2355-5262 E-ISSN: 2963-8607 DOI: https://10.63824/mahatvavirya

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Perceived usefulness (PU)

Hasil observasi dan wawancara terhadap pelaku pengadaan melalui e-katalog di jajaran Akmil, pemanfaatan e-katalog pada pengadaan barang dan jasa di Akademi Militer Magelang dinilai dapat membantu dalam menunjang efisiensi kerja. Hal tersebut dikarenakan adanya sistem yang sudah terstruktur, sehingga proses pengadaan menjadi lebih cepat, transparan, dan terorganisir. Menurut salah satu staf di Sdirenprogar Akademi Militer, e-katalog sangat memudahkan dalam bekerja.

"Pemanfaatan e-katalog itu lebih memudahkan kita dalam bekerja, karena sudah ada sistem bekerja yang sudah pakem. Sudah ada Jadi kita tinggal mengikuti alurnya dan prosesnya pun jadi lebih efisien dan minim kesalahan karena semuanya sudah terarah."(Wawancara dengan Letkol Arm Duddy M, 2025)

Sehingga pada proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Akademi Militer Magelang, tidak perlu lagi melakukan pencarian manual atau proses administrasi yang rumit karena semua sudah tersedia dalam satu platform yang mudah diakses. Selain itu, e-katalog memberikan kepastian dalam hal harga dan kualitas barang atau jasa yang ditawarkan, yang dapat mempermudah proses pengambilan keputusan serta meminimalisir potensi penyimpangan dalam proses pengadaan. Secara keseluruhan, kehadiran e-katalog membawa dampak positif terhadap peningkatan kinerja dan akuntabilitas dalam sistem pengadaan barang dan jasa di Akademi Militer Magelang.

Pemanfaatan e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa di Akademi Militer Magelang juga dinilai mampu meningkatkan transparansi dalam setiap prosesnya. Seperti hal yang dikatakan oleh Kasi Ada an. Mayor Czi Parjono sebagai berikut.

"Iya, proses pengadaan dengan e-katalog akan lebih transparan karena dapat dibuka dan dilihat oleh semua orang dan semua bisa cek kebenarannya di sistem. Semua data terekam jelas dan bisa diakses kapan saja. Hal ini membuat kepercayaan makin tinggi, karena semua proses terbuka dan bisa dipantau." (Wawancara dengan Mayor Czi Parjono, 2025)

Seluruh tahapan serta informasi terkait proses pengadaan dapat diakses secara terbuka oleh seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Akademi Militer, sehingga hal ini berkontribusi dalam mengurangi potensi terjadinya kecurangan maupun penyimpangan. Di Akademi Militer Magelang, tahapan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog dapat disaksikan dan diawasi oleh berbagai pihak terkait, baik dari internal maupun eksternal. Selain itu, sistem yang telah terintegrasi memungkinkan setiap transaksi tercatat dengan jelas, sistematis, serta bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku di Akademi Militer Magelang.



DOI: https://10.63824/mahatvavirya

P-ISSN: 2355-5262 E-ISSN: 2963-8607

Proses pengadaan barang dan jasa di Akademi Militer Magelang melalui e-katalog telah mengikuti prosedur yang teratur dan terdokumentasi, sehingga tidak perlu lagi dilakukan secara manual yang rentan terhadap kesalahan dan penyalahgunaan. Hal ini membuat sistem pengadaan menjadi lebih efisien, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance) yang diterapkan di Akademi Militer Magelang sebagai lembaga pendidikan militer terkemuka di Indonesia.

Vol. 12. No. 2. Sep 2025

b. Perceived Ease of Use (PEU)

Hasil observasi dan wawancara terhadap pelaku pengadaan melalui e-katalog di jajaran Akmil berdasarkan pendekatan Perceived Ease of Use (PEU), adalah e-katalog membantu staf dalam pekerjaan saat melakukan pengadaan barang dan jasa secara efektif dan efisien. Dengan adanya e-katalog, pekerjaan yang dilakukan menjadi lebih mudah, cepat, dan sudah tercatat dalam aplikasi.

"E-Katalog ini bisa dipakai dengan mudah, namun ada faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Di antaranya itu informasi produk yang lengkap, dukungan teknis yang baik, Semua itu berpengaruh ke kenyamanan dan kelancaran saat kita gunakan e-katalog." (Wawancara dengan Mayor Czi Parjono, 2025)

Pemanfaatan e-katalog pada pengadaan barang dan jasa di Akademi Militer Magelang memberikan kemudahan bagi personel yang sudah terbiasa dan memiliki pemahaman dasar mengenai teknologi informasi. Bagi mereka yang telah memahami alur digital dan sistem aplikasi, proses pengadaan melalui e-katalog menjadi lebih praktis dan efisien. Fitur-fitur yang disediakan dalam sistem ini cukup jelas dan sangat membantu dalam memilih serta memesan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh satuan kerja di lingkungan Akademi Militer Magelang.

"Pada awal memulai menggunakan sistem ini, memang mengalami sedikit kebingungan dalam hal tata cara dan prosedur penggunaan sistem tersebut. Banyak hal yang belum dipahami karena semuanya serba baru. Butuh waktu untuk membiasakan diri dan belajar alurnya secara bertahap. Tapi lama-lama jadi terbiasa juga, apalagi kalau sering dipakai." (Wawancara dengan Kasi Ada, 2025)

Namun, pada tahap awal penerapan sistem ini di Akademi Militer Magelang, beberapa staf salah satunya Kasi Ada merasa bahwa ia mengalami kesulitan dalam mengoperasikannya. Hal ini umumnya dialami oleh mereka yang belum terbiasa menggunakan sistem berbasis digital atau belum memiliki pemahaman yang cukup tentang teknologi informasi. Kendala yang dihadapi bisa berupa kebingungan dalam penggunaan aplikasi, hingga kurangnya pemahaman terhadap prosedur pengadaan melalui e-katalog yang diterapkan di instansi. Seperti penuturan dari salah satu staf pengadaan:

"Mudah dipahami yang tau teknologi, kalau yang tidak mengenal teknologi itu juga awalawal susah. Kalau yang sudah bisa paham teknologi itu memudahkan. Jadi sebenarnya



P-ISSN: 2355-5262 E-ISSN: 2963-8607 DOI: https://10.63824/mahatvavirya

tergantung dari kebiasaan pengguna juga. Yang penting ada bimbingan di awal, supaya semua bisa ikut menyesuaikan. (Wawancara dengan Staf Pengadaan, 2025)

Seiring dengan berjalannya waktu dan adanya upaya peningkatan kapasitas serta kebiasaan dalam penggunaan, penggunaan e-katalog di Akademi Militer Magelang menjadi semakin mudah dan dipahami. Setelah para pengguna memahami alur dan cara kerja sistem, mereka mulai merasakan kenyamanan serta efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa. Proses yang sebelumnya terasa rumit menjadi lebih sederhana dan dapat dilakukan dengan cepat hanya melalui sistem vang telah disediakan secara terintegrasi.

Pada akhirnya, pemanfaatan e-katalog di Akademi Militer Magelang menjadi solusi modern dalam pengadaan barang dan jasa yang mampu meningkatkan efektivitas kerja di lingkungan instansi. Meskipun pada tahap awal implementasinya memerlukan proses adaptasi, penerapan sistem ini telah menunjukkan efektivitasnya dengan memberikan sejumlah manfaat signifikan bagi para pengguna. Manfaat tersebut terutama tercermin dalam peningkatan keteraturan, kemudahan akses informasi, serta percepatan dan transparansi proses pengadaan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

c. Faktor Pendukung dan Penghambat Penggunaan E-Katalog di Satuan Jajaran Akmil

Perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor kunci yang mendukung pelaksanaan penggunaan e-katalog pada proses pengadaan barang dan jasa di Akademi Militer. Dengan adanya teknologi yang semakin canggih, proses pengadaan menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh berbagai pihak. Teknologi ini memungkinkan pelaksanaan pengadaan dilakukan secara digital, sehingga mengurangi kerentanan terhadap praktik korupsi.

Penggunaan e-katalog juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan sistem pengadaan yang bersih dan bebas dari korupsi. Sistem ini mendukung program zero corruption dengan menyediakan informasi yang terbuka dan dapat diawasi oleh publik. Dengan demikian, peluang terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam proses pengadaan dapat ditekan secara signifikan. Sebagai bagian dari masyarakat global, Indonesia dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada. Pemanfaatan e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa merupakan langkah nyata di Akademi Militer dalam mengikuti tren digitalisasi global. Hal ini tidak hanya meningkatkan daya saing secara nasional, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi.

Faktor yang dapat mendorong penggunaan e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa antara lain adalah kebutuhan akan transparansi, efisiensi, serta pengawasan yang lebih baik terhadap proses pengadaan. E-katalog memungkinkan pengguna untuk memilih produk dan penyedia secara langsung melalui sistem yang sudah terverifikasi, sehingga meminimalisir risiko manipulasi data atau penunjukan penyedia yang tidak kompeten. Selain itu, sistem ini mempercepat proses administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.



Vol. 12. No. 2. Sep 2025 P-ISSN: 2355-5262 E-ISSN: 2963-8607 DOI: https://10.63824/mahatvavirya

Salah satu faktor utama yang menghambat berjalannya penggunaan e-katalog di satuan jajaran Akmil dalam pengadaan barang dan jasa adalah permasalahan pada sistem yang digunakan. Terkadang, sistem e-katalog mengalami gangguan atau error, yang menyebabkan proses pengadaan menjadi terhambat. Gangguan teknis yang terjadi akibat server yang lambat, sistem yang tidak bisa diakses, atau kesalahan dalam input dan output data, yang mengganggu kelancaran transaksi dari pihak LKPP, sehingga sebagai satuan pengguna e-katalog, hanya bisa melaporkan dan menunggu perbaikan sistem dari pusat LKPP.

Selain permasalahan sistem, kendala jaringan internet atau sinyal juga menjadi penghambat signifikan, terutama terjadi bila bersamaan di Akmil sedang dilaksanakan kegiatan vicon (video conference) tingkat pusat, sehingga alokasi bandwidth jaringan internet untung mend diutamakan unutk mendukung kegiatan Gubernur Akmil Akmil tersebut. Kegiatan pengadaan dengan e-katalog ditunda atau dialihkan pada waktu yang lain karena koneksi yang tidak stabil akan membuat pengguna kesulitan mengakses e-katalog secara optimal, yang sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses pengadaan, yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat dan efisien.

"Kalau buat yang versi terbaru ini tidak ada pelatihan secara tatap muka, cuma secara online itupun barengan satu Indonesia, terus ya selanjutnya belajar pakai Youtube aja." (Wawancara Kasi Ada, 2025)

Faktor yang menjadi tantangan yaitu tidak adanya pelatihan yang secara khusus dilaksanakan secara tatap muka. Sehingga para staf mempelajari sendiri bagaimana cara mengoperasikan sistem e-katalog. Sehingga, lama kelamaan mereka mahir dan memahami bagaimana cara mengoperasikan e-katalog pada pengadaan barang dan jasa di Akademi Militer.

Penggunaan e-katalog juga menuntut sumber daya manusia yang memiliki pemahaman dan keterampilan dalam bidang teknologi. Tidak semua pegawai atau pihak yang terlibat dalam proses pengadaan di Satuan Jajaran Akmil memiliki kemampuan untuk mengoperasikan sistem digital dengan baik. Untuk itu Staf Pengadaan Akmil selaku satuan pengadaan yang bertugas untuk menyelenggarakan, mengkoordinasikan, dan mengawasi proses pengadaan dalam membantu satker Akmil dalam proses pengadaan barang dan jasa. Satuan ini memastikan bahwa seluruh kegiatan pengadaan dilakukan secara transparan, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya Pengadaan Akmil, diharapkan kebutuhan barang dan jasa dapat terpenuhi tepat waktu dan mendukung kelancaran operasional satuan. Peran ini sangat penting guna memastikan setiap tahapan pengadaan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, kebutuhan operasional satuan dapat terpenuhi secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Keberhasilan implementasi e-katalog sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi serta kapasitas SDM yang menjalankannya. Diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi para pengguna sistem, serta peningkatan kualitas jaringan internet, agar hambatan-hambatan yang ada dapat diminimalkan dan penggunaan e-katalog bisa berjalan lebih efektif dan efisien.



P-ISSN: 2355-5262 DOI: https://10.63824/mahatvavirya E-ISSN: 2963-8607

d. Implikasi Terhadap Program Zero Corruption

Akademi Militer berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 29 Februari 2024, sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian yang diberikan kepada institusi yang telah secara signifikan memenuhi indikator-indikator utama reformasi birokrasi, antara lain manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan sistem pengawasan, serta peningkatan akuntabilitas kinerja. Akademi Militer dinilai telah menunjukkan kapabilitas dalam memperkuat kapasitas organisasi dan meningkatkan akuntabilitas, menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Pencapaian ini menjadi sumber motivasi bagi seluruh personel TNI AD untuk terus menjunjung tinggi integritas dan transparansi administrasi, sekaligus menjadi role model bagi institusi lain dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi. Prestasi tersebut menjadikan Akmil semakin giat untuk meningkatkan kapasitas dirinya menuju WBBM, wilayah birokrasi bebas dan melayani. Komitmen Akmil dalam menuju WBBM salah satunya adalah dengan menegakkan prinsip zero corupptions khususnya dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa yang rawan terhadap penyelewengan dan korupsi. Dimana program pemerintah dalam menuju zero corupptions pada bidang pengadaan adalah dengan menerapkan e-katalog.

Penggunaan e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Akademi Militer memberikan dampak positif terhadap upaya penerapan prinsip zero corruption. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa staf yang terlibat dalam proses pengadaan, sistem e-katalog dinilai mampu menciptakan transparansi yang lebih baik. Proses pemilihan barang dan penyedia menjadi lebih terbuka karena semua informasi seperti harga, spesifikasi, dan penyedia sudah tersedia dalam sistem. Hal ini secara tidak langsung mengurangi potensi manipulasi dan intervensi pihak-pihak tertentu yang selama ini menjadi celah terjadinya korupsi.

Selain transparansi, e-katalog juga membantu menciptakan efisiensi dalam proses pengadaan. Salah satu narasumber menyampaikan bahwa sistem ini mempersingkat waktu pengadaan karena tidak perlu melalui proses lelang konvensional yang panjang. Di lingkungan militer, di mana ketepatan waktu sangat penting, percepatan ini menjadi keuntungan tersendiri. Barang yang dibutuhkan untuk keperluan pelatihan maupun operasional dapat tersedia lebih cepat, sehingga mendukung kelancaran kegiatan di Akademi Militer.

Penerapan e-katalog juga membawa pengaruh terhadap pembentukan integritas anggota. Kaada menekankan bahwa sistem ini mendorong seluruh pihak yang terlibat pada pengadaan barang dan jasa di Akademi Militer agar bekerja secara profesional dan sesuai prosedur. Karena semua proses terekam secara digital, setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini selaras dengan nilai-nilai yang ingin ditanamkan kepada para taruna, yaitu kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.



DOI: https://10.63824/mahatvavirya

Bukti keberhasilan berdasarkan hasil temuan audit dari irjenad terkait anggaran di satuan jajaran akmil bahwa tidak ditemukan penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran, semua anggaran terserap sesuai dengan koridor peruntukan dan peraturan yanag berlaku. Pada kasus tersebut salah satu faktor pendukungnya adalah karena Satker Akmil telah menerapkan e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa yang menjadi tanggung jawab Satkernya.

Namun demikian, masih ditemukan beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Kaada menyebutkan bahwa penggunaan e-katalog membutuhkan kemampuan teknologi yang memadai, baik dari segi SDM maupun infrastruktur. Tidak semua anggota terbiasa dengan sistem digital, sehingga pelatihan menjadi hal yang penting. Selain itu, kestabilan jaringan internet juga menjadi faktor penentu kelancaran penggunaan sistem ini. Meskipun begitu, secara keseluruhan e-katalog dianggap sebagai langkah positif dalam mendukung pengadaan yang bersih dan bebas dari korupsi di lingkungan Akademi Militer.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pemanfaatan e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa di Akademi Militer Magelang memberikan kontribusi signifikan terhadap efisiensi dan keteraturan proses kerja. Sistem yang telah terstruktur memungkinkan proses pengadaan dilakukan lebih cepat, transparan, dan minim kesalahan. Informasi produk yang tersedia secara lengkap dan tersentralisasi juga membantu mempercepat pengambilan keputusan.

Dari sisi kemudahan penggunaan, e-katalog dinilai cukup mudah dioperasikan oleh pengguna yang memiliki pemahaman teknologi dasar. Namun, masih ditemukan kendala pada tahap awal implementasi, khususnya bagi staf yang belum familiar dengan sistem digital. Meskipun begitu, dengan pembiasaan dan dukungan teknis yang tersedia, hambatan tersebut secara bertahap dapat diatasi.

Faktor pendukung utama keberhasilan implementasi e-katalog di antaranya adalah kesiapan infrastruktur teknologi, kebutuhan akan transparansi, dan komitmen institusi terhadap tata kelola yang baik. Meski masih terdapat tantangan seperti gangguan sistem, koneksi internet yang tidak stabil, dan terbatasnya pelatihan langsung, secara keseluruhan e-katalog terbukti efektif mendukung program zero corruption serta meningkatkan integritas dalam proses pengadaan di lingkungan Akademi Militer.

Dalam konteks program Zero Corruption, penerapan e-katalog terbukti mendukung prinsip transparansi dan integritas, serta membantu Akademi Militer meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Sistem ini mampu menciptakan proses pengadaan yang terbuka, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, e-katalog tidak hanya menjadi alat pengadaan yang efisien, tetapi juga instrumen penting dalam menjaga



P-ISSN: 2355-5262 E-ISSN: 2963-8607

P-ISSN: 2355-5262 DOI: https://10.63824/mahatvavirya E-ISSN: 2963-8607

akuntabilitas, integritas, dan tata kelola pemerintahan yang bersih di lingkungan Akademi Militer.

Saran

- 1. Akademi Militer tetap mempertahankan kondisi ZI-WBK (Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi) bahkan harus dapat ditingkatkan menjadi WBBM (Wilayah Birokrasi Bebas Melayani) agar zero corruption benar-benar terlaksana secara berkelanjutan.
- 2. Kebijakan Komando Atas terkait aplikasi pengadaan tiap tahun berubah contoh pada pembaruan versi Inaproc, dari Inaproc 5 berubah ke Inaproc versi 6, sehingga perlu adanya sosialisasi berkelanjutan dan penguatan komitmen pimpinan dalam mendukung digitalisasi secara menyeluruh, guna menciptakan budaya transparansi akuntanbilitas yang berkelanjutan melalui teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariesta, D. (2021). Efektivitas pengadaan barang dan jasa melalui e-catalogue di Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies, *1*(2), 156–172. https://doi.org/10.53754/iscs.v1i2.26
- Ariza, D. (2024). E-katalog: Langkah strategis pemerintah dalam memerangi fraud pengadaan barang dan jasa. Akademik: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis, 4(1), 20-29. https://doi.org/10.37481/jmeb.v4i1.649
- Asad, A. F., & Musyarofah, S. (n.d.). Reorientasi audit internal untuk melawan korupsi pengadaan. [Manuscript in preparation].
- Azkiya, S. R., & Labibah. (2023). Analisis penerimaan aplikasi iKalsel menggunakan teori teknologi. Jurnal Perpustakaan.
- Hasan, D. M., Syahril, M. A. F., Tahir, M., Hasdar, H., & Murdiono, M. (n.d.). Kewenangan penyelidikan kasus korupsi di tubuh TNI: Siapa yang berhak? [Manuscript in preparation].
- Iqbal, M. (2020). Pengaruh pelaksanaan e-katalog dalam pengadaan barang/jasa pemerintah 77–97. terhadap UMKM. Jurnal **USM** Law Review. 3(1),https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2204
- Rumate, P. V. O. (n.d.). [Judul artikel tidak tersedia]. [Manuscript in preparation].
- Ramadhani, D., & Nurcahyanto, H. (n.d.). Implementasi e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Semarang. [Manuscript in preparation].
- Sihaloho, S. W., Ariza, D., & Munandar, A. (2024). Efektivitas e-katalog pada kegiatan pengadaan barang dan jasa (PBJ) dalam upaya pemerintah mencegah fraud. Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business, 7(1), 219-230. https://doi.org/10.37481/sjr.v7i1.798

